

BAB II

POLA HUBUNGAN PEMERINTAH KOREA SELATAN-CHAEBOL SERTA KONDISI DAN RESPON PASCA PENERAPAN SANKSI TIONGKOK

Hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol selama ini telah banyak diketahui sebagai salah satu yang membuat perubahan pesat pada ekonomi Korea Selatan. Hubungan keduanya di dorong dengan kondisi ekonomi Korea Selatan sebelumnya yang sangat memprihatinkan, ditambah adanya konflik dengan Korea Utara hingga terjadi perang saudara yang semakin membuat kondisi Korea Selatan menjadi lebih parah. Namun, keadaan menyedihkan ini telah berhasil dilewati Korea Selatan dengan berbagai cara yang dilakukannya. Dalam menyelesaikan permasalahan pada sektor ekonomi, pemerintah telah mempercayakannya pada Chaebol untuk bekerjasama dalam membangun ekonomi negara dan terbentuklah hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol hingga saat ini.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pola hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol serta kondisi dan respon pasca penerapan sanksi Tiongkok. Penulis akan membagi pembahasan menjadi 3 sub-bab. Sub-bab pertama akan membahas mengenai perkembangan hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol, bermula dari berakhirnya perang Korea 1953, dilanjutkan dengan kepemimpinan presiden Park Chung Hee yang telah berhasil meningkatkan ekonomi Korea Selatan, dan kepemimpinan setelahnya yakni Chun Doo Hwan, Roh Tae Woo, dan Kim Young Sam dan pasca adanya krisis finansial 1997. Sub-bab kedua membahas

mengenai dinamika pada hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Sub-bab ketiga membahas mengenai kondisi dan respon pasca penerapan sanksi Tiongkok.

2.1 Perkembangan hubungan pemerintah Korea Selatan-Chaebol

Membahas mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dengan Chaebol, maka tak lepas dari peristiwa perang Korea. Berakhirnya perang Korea pada tahun 1953 telah membuat keadaan Korea Selatan sangat memprihatinkan, keadaan sebagian besar gedung dan bangunan telah banyak yang rusak dan hancur, tingkat perekonomian yang jatuh, fasilitas industri yang ikut hancur, dan hilangnya bahan baku dan produk. Adanya perang juga telah mempengaruhi ekonomi makro Korea Selatan, anggaran belanja negara meningkat dengan cepat untuk membantu membiayai belanja militer (Rhyu, 2005, pp. 204-205). Hancurnya jalur manufaktur juga menyebabkan lumpuhnya distribusi pada barang dan jasa, sehingga menyebabkan harga bahan produk dan bahan pokok meningkat dengan cepat.

Tabel 2.1 Data Kerusakan Industri Manufaktur (per Agustus 1951)

	Total jumlah kerugian (US\$ 1.000)	Total kerusakan fasilitas (%)
Logam	653	26
Mesin	793	35
Kimia	15.412	33
Tekstil	92.722	64
Keramik	1.644	40
Makanan	1.594	20
Percetakan	2.444	75

Sumber: (Rhyu, 2005, p. 206)

Melihat keadaan negara yang seperti itu membuat pemerintah diharuskan untuk membuat kebijakan yang dapat menstabilkan ekonomi negara dan memperbaiki keadaan yang ada. Pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan rekonstruksi ekonomi, dimana pemerintah Korea Selatan memberikan dana bantuan untuk mendorong dan memulihkan kelompok bisnis domestik mereka. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan bisnis domestik untuk melakukan produksi dengan menyesuaikan permintaan kebutuhan pada saat itu. Dengan bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada bisnis domestiknya, maka perekonomian domestik pun menjadi lebih stabil, termasuk harga bahan-bahan pokok maupun produksi (Rhyu, 2005, p. 207). Dengan begitu, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk meneruskan hubungan antara pemerintah dengan bisnis. Interaksi antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol dalam peristiwa inilah yang menjadi awal mula hubungan keduanya.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Korea Selatan tidak berhenti disitu saja. Pemerintah terus mencoba untuk melakukan yang lebih baik karena selama ini peningkatan dirasa belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian, hingga masa pemerintahan Park Chung Hee. Masa pemerintahan Park Chung Hee (1962 – 1979) dikenal sebagai rezim yang otoriter dan ambisius, namun masa ini merupakan masa mulai bangkitnya perekonomian Korea Selatan secara signifikan. Park memiliki keyakinan bahwa untuk menjadi negara yang kuat, maka dibutuhkan juga perekonomian yang kuat (Cho M. , 2015). Itulah kenapa pada masa pemerintahannya, Park lebih fokus untuk meningkatkan ekonomi negaranya.

Pada awal masa kepemimpinan, Park mencoba memulai dengan membentuk *The Economic Planning Board (EPB)* yang bertujuan untuk merencanakan pembangunan negara untuk meningkatkan perekonomian dan memperkuat stabilitas politik. Perencanaan pembangunan pada masa Park Chung Hee ini dikenal dengan istilah *Five years Development Plan* atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dapat merubah kebijakan dari industrialisasi berorientasi impor ke pertumbuhan berorientasi ekspor. Berikut merupakan data rencana pembangunan (IPFS, 2016).

Tabel 2.2 Pembangunan Lima Tahun pada Era Park Chung Hee

Tahun	Rencana Pembangunan
1962 – 1966	Memperluas industri energi listrik dan batu bara, pembangunan infrastruktur, produktivitas pertanian, ekspor, dan mempromosikan kemajuan teknologi.
1967 – 1971	Mengubah arah industri ke industri berat agar dapat lebih kompetitif di pasar dunia, pembangunan infrastuktur jalan untuk memudahkan transportasi, dan memfokuskan industri pada industri baja dan petrokimia.
1972 – 1976	Menerapkan <i>Heavy Chemical Industrialization Plan (HCIP)</i> atau rencana penerapan industri kimia berat.
1977 – 1981	Menghadapi adanya penurunan pada PNB dan banyaknya permasalahan ekonomi membuat pembangunan tahun ini lebih fokus pada pemulihan.

Sumber : (IPFS, 2016)

Selain itu, Park juga telah mengarahkan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya pengaturan modal dan peningkatan ekspor. Pada masa pemerintahannya, bank komersial dinasionalisasi dan dikontrol ketat oleh kementerian

keuangan, suku bunga diatur dan diarahkan pada pada industri dan perusahaan tertentu, dan subsidi keuangan diberikan khususnya untuk industri dan perusahaan berbasis ekspor (Mah, 20017). Pada penerapan untuk lebih menumbuhkan ekspor Korea Selatan, Park melakukannya dengan cara menerapkan kebijakan mengenai pemberian subsidi pada setiap bisnis domestik yang mampu mengekspor produknya dan memberikan jaminan investasi bagi perusahaan dengan nilai ekspor yang tinggi. Berdasarkan hasil yang didapat, Chaebol muncul sebagai kandidat terkuat karena memiliki nilai ekspor tertinggi dibandingkan bisnis lainnya (Lim & Hanguk, 2000).

Untuk menepati janjinya, pemerintahan Park Chung Hee telah memberikan dukungan pada Chaebol dan melakukan ekspansi kebijakan untuk mendorong perkembangan Chaebol dengan menerapkan intervensinya. Beberapa dorongan yang diberikan pemerintah seperti bantuan keuangan, pinjaman uang dengan suku bunga rendah, pemotongan pajak, memperluas dan mempermudah akses pasar bagi Chaebol (Phil Sang, 2000, p. 2). Selain itu pemerintah juga melakukan intervensi pada tarif, kuota, dan subsidi ekspor. Intervensi tarif dilakukan pemerintah dengan menciptakan harga pada pasaran, dimana penetapan harga dapat berbeda untuk pembeli asing. Hal ini dilakukan pemerintah Korea Selatan dengan tujuan untuk melindungi industri lokal dari adanya kompetisi dagang dengan asing, sehingga dapat lebih membantu mereka untuk berkembang (Amsden, 1989, pp. 55-78). Meskipun begitu, pemerintah tidak serta merta mengintervensi secara mutlak, namun lebih kepada memposisikan dirinya dengan tetap memberikan ruang gerak yang besar bagi jalannya mekanisme pasar.

Park Chung Hee membuktikan bahwa kebijakannya untuk memberikan dukungan terhadap Chaebol bukanlah tindakan yang salah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil yang telah didapatkan seperti total ekspor yang melambung tinggi dari US\$60 juta di tahun 1962 mencapai US\$1,4 milyar di tahun 1971 dan kenaikan pada GNP yang mencapai 2 kali lipat dari 3,071 milyar menjadi 6,962 milyar pada periode yang sama (Chung C. , 1995, p. 64). Keberhasilan ini tentunya dapat diraih karena adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan Chaebol, selain itu juga karena adanya transparansi antara satu sama lain. Pada tahun 1963, keduanya telah membentuk federasi dengan tujuan untuk menumbuhkan koordinasi antara keduanya (Cho M. , 2015).

Meskipun pemerintahan Park Chung Hee berhasil dalam meningkatkan perekonomian Korea Selatan, akan tetapi terdapat beberapa hal yang dianggap kurang dalam pemerintahannya (Jwa, 2014), seperti:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang tercapai berada di bawah pemerintahan rezim telah menyebabkan penolakan dari banyak kalangan.
- b. Dipimpin oleh pemerintahan yang tidak demokratis, sehingga kerap terjadi pembatasan dalam kebebasan politik dan ekonomi.
- c. Kebijakan industri “Pro-Chaebol” telah menyebabkan ketidakseimbangan pada sektor ekonomi dan ketidakmerataan dalam pembangunan.

Seiring dengan adanya pergantian kepala pemerintahan, dukungan yang diberikan terhadap Chaebol juga berbeda-beda dari pemerintahan Park. Pasca

pemerintahan Park Chung Hee yang bersifat diktator, masyarakat Korea Selatan berharap bahwa kepemimpinan selanjutnya yang dipimpin Chun Doo Hwan dapat merubah sistem pemerintahan Korea Selatan menjadi pemerintahan demokrasi, akan tetapi semua tak sesuai dengan harapan karena pemerintahan Chun Doo Hwan kembali menerapkan sistem otoriter (Kim, Jeon, Kim, & Heo, 2008, pp. 7-8).

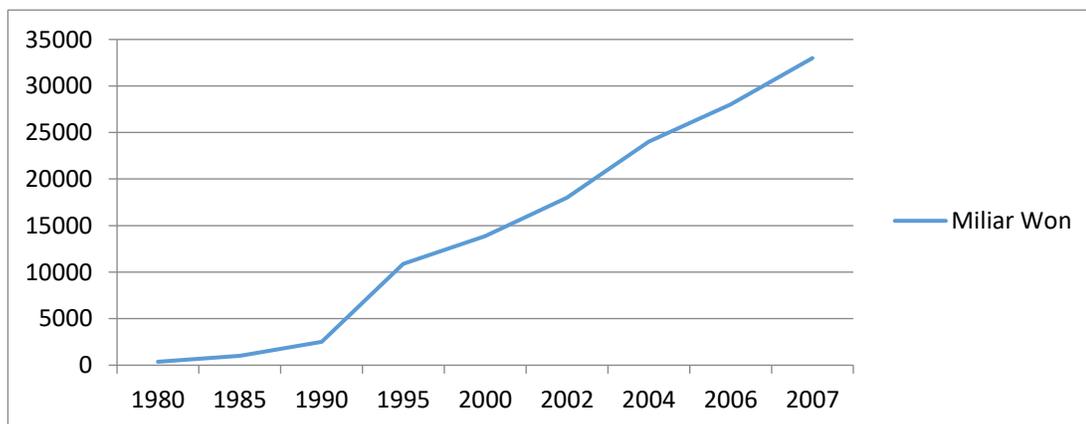
Meskipun memiliki kesamaan dengan sistem otoriter, namun pemerintah Chun menerapkan beberapa kebijakan yang bertolak belakang dari Park. Kebijakan Chun yang dianggap bertolak belakang dengan Park, antara lain yaitu Chun menerapkan kebijakan mengenai pengurangan dukungan pemerintah terhadap Chaebol, dengan membatasi akses kredit Chaebol sehingga bank-bank komersial Chaebol diprivatisasi (Woo, 1991). Selain itu, Chun membatasi ekspansi perusahaan afiliasi Chaebol dengan meminta Chaebol mengatur ulang struktur perusahaan dan melepaskan perusahaan yang tidak dibutuhkan (Lee, 1997). Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kebijakan Park yang sangat mendorong Chaebol untuk meningkatkan ekonomi di pasar Korea Selatan.

Setelah beberapa kali mengalami periode kepresidenan dengan sistem otoriter, pada tahun 1988 kursi presiden Korea Selatan telah berhasil ditempati oleh Roh Tae Woo dengan cara yang demokratis yakni melalui pemilu tahun 1987. Dengan adanya perubahan sistem yang menjadi demokratis, hal ini juga berpengaruh kepada bagaimana hubungan pemerintah dan bisnis. Adanya perubahan ini telah mulai mengikis otoritas pemerintah dalam menjalin hubungan tradisionalnya dengan bisnis,

terutama dengan Chaebol karena selama ini dianggap pemerintah terlalu mengintervensi pasar demi kepentingan Chaebol.

Pada periode pemerintahan ini, pinjaman bank yang dikendalikan pemerintah untuk menyediakan pinjaman murah pada Chaebol telah menurun secara substansial. Chaebol telah mampu untuk memobilisasi modal dan mendapatkan modal di pasar internasional tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Sehingga, telah dipastikan bahwa pada periode ini ruang lingkup intervensi pemerintah atas bisnis telah menyempit dan struktur pinjaman ekspor, juga subsidi suku bunga telah diperketat (Cho & Kim, 1995, p. 20). Meskipun pinjaman pemerintah untuk Chaebol telah banyak berkurang, Roh memilih untuk memberikan dukungan yang berbeda dalam meningkatkan daya saing Chaebol di pasar internasional yaitu dengan investasi *research and development* (R&D). Dapat dilihat bahwa pasca tahun 1980, investasi R&D di Korea Selatan telah banyak mengalami peningkatan hingga 60 kali lipat.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Investasi R&D Korea Selatan



Sumber: (Chung S. , 2011, pp. 340-41)

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Kim Young Sam dikenal sebagai pemerintahan yang sangat demokratis. Kim Young Sam telah mulai meliberalisasi ekonomi melalui deregulasi dan pengurangan intervensi pemerintah. Selain itu, Kim telah memutuskan untuk bergabung dengan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) sehingga Kim diharuskan mendorong kebijakan ekonomi, termasuk meliberalisasi nilai tukar mata uang asing, membuka investasi asing secara langsung dan menerapkan asuransi (Kim, Jeon, Kim, & Heo, 2008, p. 15). Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan dapat menyebabkan peningkatan pada ekonomi Korea Selatan.

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Kim Young Sam telah merubah tata kelola keuangan dari yang sebelumnya dimana kredit asing tidak secara langsung diserahkan kepada negara, namun dengan perantara bank yang akan digunakan sebagai alat untuk membiayai strategi industrialisasi yang direncanakan negara yang salah satunya menyediakan pinjaman murah untuk perusahaan Chaebol, lebih diarahkan kepada investasi asing secara langsung dan merubah fokus dari strategi sebelumnya yang mengarah pada pembangunan dan proteksi pada industri domestik, lebih diarahkan kepada strategi *segyewa* atau globalisasi yang lebih memfasilitasi globalisasi ekonomi Korea Selatan. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan dapat membantu kebutuhan hubungan Chaebol untuk mengekspansi perusahaannya (Kalinowski & Cho, 2009, pp. 6-7).

Tahun 1997 merupakan tahun yang cukup dramatis bagi perekonomian Asia. Nilai tukar mata uang asing telah melonjak tinggi di negara-negara Asia Tenggara, dan

diprediksi bahwa krisis ini akan berefek domino pada negara-negara Asia lainnya (Park, 1998, p. 1). Tepatnya pada bulan November 1997, telah terdengar kabar mengenai melonjaknya nilai tukar mata uang asing di Korea Selatan. Nilai tukar mata uang asing yang awalnya bernilai 864 won per dolar, telah melonjak menjadi 1.690 won per dolar pada bulan Desember (Chang, 2003, p. 3). Tidak hanya itu saja, Korea Selatan juga mengalami suku bunga yang naik, pasar saham yang jatuh, dan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, termasuk juga perusahaan Chaebol (Park, 1998, p. 2). Kejadian terburuk yaitu dimana cadangan devisa nasional telah habis menjadi US\$3,8 miliar dan ini dapat mendorong berhentinya perekonomian negara. Hutang luar negeri mencapai US\$150 miliar, hampir empat kali lipat jumlah hutang selama periode 1992-1997 yang hanya US\$40 miliar, dan hampir membuat negara bangkrut (Phil Sang, 2000, p. 5).

Banyak sumber mengatakan bahwa selain efek domino yang membuat ekonomi Korea Selatan mengalami krisis, penyebab lainnya adalah hubungan antara pemerintah dengan bisnis domestik. Hal ini dikarenakan selama ini pemerintah telah memaksa bank untuk menyalurkan pinjaman dana ke beberapa Chaebol, yang kemudian mengakibatkan penumpukan hutang mencapai sekitar 52 miliar dollar. Pemerintah melakukan hal ini dengan tujuan untuk menumbuhkan ekonomi Chaebol, akan tetapi banyak Chaebol yang tidak disiplin dan tidak dapat melunasi pinjaman mereka (Park, 1998, p. 3). Sebelumnya, telah banyak pihak mengkritik mengenai intervensi yang dilakukan negara pada Chaebol, selama ini intervensi dianggap terlalu berlebihan dan dikhawatirkan dapat mendorong ekonomi di ambang pada krisis hutang, meningkatkan

masalah ekuitas dan adanya potensi korupsi (Lim, 2003, p. 36). Rupanya kritikan tersebut benar dan terjadilah krisis 1997 di Korea Selatan.

Dengan kejadian krisis finansial 1997 ini, telah membuat hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol cukup renggang. Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah tegas pada hubungannya dengan Chaebol agar krisis serupa tidak akan kembali terjadi di masa depan (Kim K. , 2006, p. 12). Oleh karena itu, pemerintah telah menginstruksikan Chaebol untuk berkonsentrasi pada bisnis inti mereka dan untuk anak perusahaan yang dirasa tidak memberikan keuntungan dianjurkan untuk ditutup agar tidak menimbulkan masalah baru, pemerintah juga membiarkan hampir setengah dari Chaebol yang dirasa sudah tidak dapat dipertahankan mengalami kebangkrutan atau berada dibawah kekuasaan asing. Selain itu, pemerintah memutuskan untuk merubah tata aturan bank dalam memberikan pinjaman pada Chaebol, seperti penentuan batas kredit macet dari masa tunggakan 6 bulan dan telah disesuaikan dengan standar nasional menjadi 3 bulan. Dalam hal ini, Chaebol dituntut untuk lebih tertib dalam mentaati aturan bank, karena selama ini dengan adanya dukungan yang diberikan pemerintah kepadanya, membuat Chaebol terlalu mengentengkan aturan tata tertib dalam pinjaman dana bank (Kim K. , 2006, p. 15).

Lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan juga memutuskan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan karena selama ini telah banyak menjadi perdebatan mengenai tata kelola perusahaan Chaebol, terlebih lagi selama ini masih kurang adanya transparansi antara perusahaan Chaebol dengan pemerintah, sehingga dengan sistem

ini diharapkan perusahaan menjadi lebih efisien dan tertata. Beberapa rencana restrukturisasi ekonomi adalah sebagai berikut;

Tabel 2.3 Rencana Tata Kelola dan Restrukturisasi Perusahaan Korea

Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengharuskan adanya laporan keuangan perusahaan untuk dipersiapkan • Menerapkan proses audit berdasarkan standar internasional • Mengharuskan adanya publikasi laporan keuangan gabungan untuk perusahaan asosiasi • Mengurangi penggunaan jaminan timbal balik oleh afiliasi/anak perusahaan
Restrukturisasi Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mangadopsi <i>Corporate Restructuring Promotion Law</i> (berlaku hingga 2005), undang-undang ini berisi tentang meniadakan institusi atau perusahaan yang menimbulkan masalah pada ekonomi • Memastikan bahwa semua restrukturisasi bersifat sukarela dan berorientasi pasar • Mengharuskan adanya izin persetujuan dalam pengambil-alihan perusahaan Korea oleh asing • Manaikkan batas kepemilikan saham yang dapat diperoleh orang asing dari 10% menjadi 33%

Sumber: (Sohn C. , 2002, pp. 30-35)

Dengan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah, Korea Selatan telah berhasil membangkitkan kembali ekonomi negaranya. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mengembalikan posisi perekonomian negara, salah satunya mengembalikan kepercayaan pasar dan kembali menarik investor untuk berinvestasi di Korea Selatan. Keberhasilan Korea Selatan yang cepat dalam memulihkan kondisi dari

krisis ekonomi 1997 ini banyak mendapatkan pujian dari berbagai pihak seperti IMF, World Bank, dan beberapa ekonom (Kalinowsk, 2008, p. 448). Berikut ini merupakan tabel data kenaikan investor asing yang kembali berinvestasi di Korea Selatan pasca krisis finansial 1997;

Tabel 2.4 Data Investasi Asing di Korea Selatan

	Total Investasi Asing	Investor Asing Individu
Mei 1997	23	6
November 1997	26	7
12 Desember 1997	50	50
30 Desember 1997	55	50
Mei 1998	100 (liberalisasi secara penuh)	100 (liberalisasi secara penuh)

Sumber: (Akama, Noro, & Tada, 2003, p. 7)

Dengan data diatas, maka dapat dilihat kenaikan investasi Asing di Korea Selatan setelah adanya kejadian krisis finansial tahun 1997. Kenaikan jumlah investasi asing ini sangatlah berarti untuk Korea Selatan. Perlu diketahui, bahwa sebelumnya dengan kondisi pada saat krisis, banyak investor yang kehilangan kepercayaan untuk tetap berinvestasi di Korea Selatan karena adanya ketakutan akan kerugian pada bisnis mereka. Adanya ketakutan tersebut telah membuat banyak dari mereka yang memutuskan untuk berpindah investasi ke negara lain. Dengan usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonominya, para investor kembali percaya untuk berinvestasi di Korea Selatan, bahkan dengan jumlah yang terus meningkat.

2.2 Dinamika hubungan pemerintah Korea Selatan-Chaebol

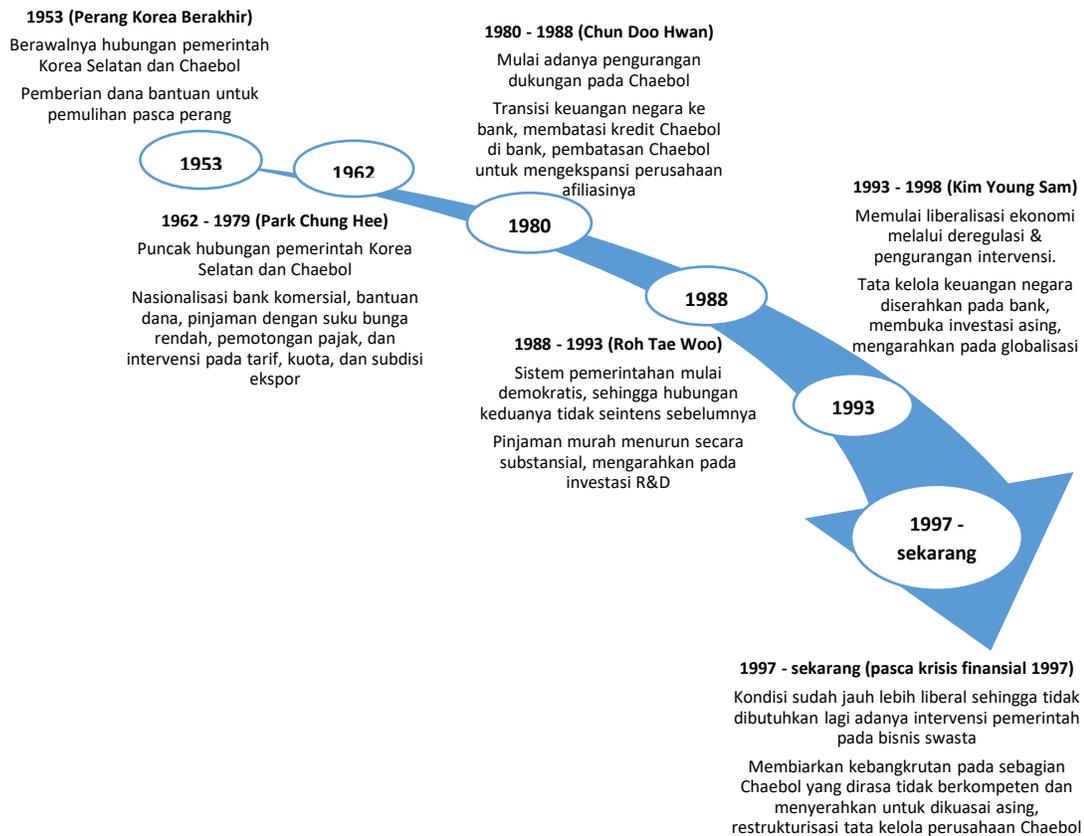
Membahas mengenai hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol, status hubungan yang terjalin antara keduanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin negara yang sedang berkuasa, hal ini menyebabkan hubungan keduanya dapat berubah-ubah sesuai kebijakan pemerintahan yang memimpin atau mengalami pasang surut. Namun, meskipun telah banyak mengalami perubahan hubungan pada setiap pemerintahan, selama ini hubungan keduanya tetap terjalin dengan erat. Menurut Phil Sang, selama ini belum ada rezim politik yang tidak menjaga hubungannya dengan Chaebol karena keduanya memiliki hubungan yang saling tergantung satu sama lain, baik untuk kebutuhan ekonomi maupun politik (Phil Sang, 2000, p. 4).

Berakhirnya peristiwa perang Korea merupakan awal mula dari hubungan pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Pada masa awal tersebut, hubungan keduanya sangatlah harmonis, terlihat bagaimana pemerintah telah mempercayai Chaebol dan memutuskan untuk memberikan dana bantuan dan pinjaman murah pada perusahaan bisnis keluarga tersebut. Terlebih lagi pada masa kepemimpinan Park Chung Hee, dimana ekonomi Korea Selatan telah masuk pada masa kebangkitannya berkat hubungan harmonis dengan Chaebol. Park telah mengintervensi pasar dan memperlakukan Chaebol dengan sangat spesial, hingga membuat kekhawatiran pada rakyat akan adanya praktek buruk diantara keduanya (Tejada, 2017). Seiring dengan adanya pergantian pemerintahan, hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol juga mengalami perubahan. Beberapa perubahan yang sangat dirasakan

diantaranya yaitu dimana pemerintah secara bertahap telah mengurangi porsi dalam mengintervensi pasar dan juga dalam pemberian dana pinjaman pada Chaebol yang telah diserahkan kepada bank (Mah, 20017).

Perubahan pada hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol paling terasa yakni setelah adanya peristiwa krisis finansial tahun 1997. Peristiwa krisis finansial ini merupakan sebuah peringatan karena sikap pemerintah selama ini yang terlalu memberikan perhatian lebih kepada Chaebol, namun justru membuat kondisi Korea Selatan terpuruk karena sikap tidak disiplin yang dimiliki sebagian Chaebol (Park, 1998, p. 3). Selain itu, perubahan pada hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol setelah krisis finansial 1997 juga dipengaruhi oleh kondisi global yang seiring berjalannya waktu negara-negara di dunia semakin terbuka terhadap satu sama lain, termasuk Korea Selatan.

Berbeda dengan sebelumnya yang cenderung menutup diri dari adanya campur tangan asing, saat ini Korea Selatan sudah jauh lebih terbuka. Dengan begitu, ekonomi Korea Selatan yang sebelumnya sangat tergantung dengan adanya intervensi dari pemerintah, maka saat ini sudah lebih liberal karena perusahaan tidak hanya bisa mendapatkan modal dari pemerintah saja, namun bisa mendapatkannya dari asing dan juga dengan cara membuka investasi (Akama, Noro, & Tada, 2003, p. 7). Hal ini membuat hubungan antara pemerintah Korea Selatan dan Chaebol tidak seintens seperti sebelumnya, namun hubungan keduanya tetap terjalin erat dan akan terus berlangsung, karena keduanya memiliki kepentingan dan peranan yang penting.



Sumber: penulis

2.3 Kondisi dan Respon Pemerintah Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi

Pada penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan, terdapat 2 pihak yang terkena dampak yakni pemerintah Korea Selatan dan Chaebol. Pada sub-bab ini akan dibahas mengenai kondisi dan respon Korea Selatan dan Chaebol pasca penerapan sanksi Tiongkok;

2.3.1 Pemerintah Korea Selatan

Menanggapi keputusan Korea Selatan untuk memasang THAAD di negaranya membuat Tiongkok memutuskan untuk menerapkan sanksi pembalasan. Tiongkok

telah memblokir akses barang dan jasa yang berasal dari Korea Selatan di berbagai sektor, seperti; pada sektor hiburan dan budaya dengan melarang penampilan artis Korea Selatan dan program acara yang menampilkan tentang Korea; sektor pariwisata dengan melarang agen travel membuka destinasi ke Korea Selatan dan; pada sektor bisnis dengan memboikot produk dan perusahaan Korea Selatan yang berada disana.

Akibat adanya kejadian ini Korea Selatan telah mengalami kerugian yang cukup besar pada perekonomiannya. Menurut laporan yang dirilis oleh *South Korea Hyundai Research Intitute*, pada tahun 2017 saja kerugian yang harus ditanggung mencapai US\$7.5 milyar dan kerugian ini setara dengan 0,5 persen dari PDB negara hingga akhir tahun 2017. Pada sektor industri hiburan dan budaya, kerugian terjadi karena telah mengalami penurunan surplus yang mencapai 23,2% atau setara dengan US\$54,3 juta. Sektor yang paling menderita akibat sanksi Tiongkok ini adalah sektor pariwisata, *South Korea Hyundai Research Intitute* menyatakan bahwa jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Korea Selatan telah menyusut hingga 40% antara bulan April hingga Desember 2017, total kerugiannya mencapai US\$6,3 milyar. Total dari kerugian sektor pariwisata ini mencapai 84% dari total kerugian Korea Selatan akibat sanksi Tiongkok pada tahun 2017 (China Daily, 2017).

Menanggapi hal ini pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk melaporkannya kepada WTO karena langkah Tiongkok ini dirasa telah melanggar beberapa perjanjian perdagangan, namun solusi yang didapatkan adalah adanya konsultasi antara 2 belah pihak. Untuk itu, pihak Korea Selatan telah berupaya untuk bertemu pihak Tiongkok agar permasalahan ini cepat terselesaikan seperti pada sela-

sela pertemuan “*G20 Hamburg Summit*” di Jerman. Upaya ini ternyata gagal karena Tiongkok menolak permintaan untuk bertemu dengan berbagai alasannya (Kim & Chung, 2017). Tidak hanya itu saja, Amerika yang merupakan negara pemilik teknologi THAAD juga turut serta dalam meyakinkan Tiongkok. Amerika telah mencoba mengundang Tiongkok untuk melakukan pembicaraan teknis, akan tetapi undangan tersebut tetap saja di tolak (Panda, 2017) Selain itu, Korea Selatan dan Amerika juga terus mencoba untuk meyakinkan Tiongkok bahwa satu-satunya tujuan dari sistem THAAD adalah mempertahankan kawasan dari adanya ancaman rudal milik Korea Utara yang terus meningkat, tanpa adanya unsur tujuan lainnya (Kim & Chung, 2017).

Pemerintah Korea Selatan secara terus menerus melakukan pendekatan pada pihak Tiongkok agar permasalahan ini cepat terselesaikan, hingga akhirnya terjadilah pertemuan antara Presiden Moon Jae-in dengan Presiden Xi Jinping dalam sela-sela pertemuan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* yang dilaksanakan di Vietnam pada pertengahan bulan November 2017. Pada pertemuan tersebut, Moon Jae-in dan Xi Jinping mencoba untuk terbuka mengenai apa yang menjadi permasalahan utama pada kejadian ini. Xi Jinping telah menjelaskan bahwa yang selama ini ditakutkan oleh negaranya adalah dengan adanya penempatan THAAD di Korea Selatan dapat mengurangi kemampuan rudal miliknya dalam melakukan serangan nuklir dalam perang melawan Amerika Serikat karena tentunya hal ini sangat merugikan posisinya.

Dengan adanya pertemuan antara Presiden Moon Jae-in dan Presiden Xi Jinping ini maka secara tidak langsung keduanya telah mengkonfirmasi kembalinya hubungan

kerjasama antara Korea Selatan dengan Tiongkok, seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Korea Selatan kepada CNBC;

"Both sides shared the view that the strengthening of exchange and cooperation between Korea and China serves their common interests and agreed to expeditiously bring exchange and cooperation in all areas back on a normal development track" (CNBC , 2017)

Pernyataan tersebut menyatakan kedua belah pihak berbagi pandangan bahwa penguatan kerjasama antara Korea Selatan dan Tiongkok adalah kepentingan bersama dan ingin mempercepat kembalinya hubungan keduanya. Pihak Tiongkok juga telah menegaskan bahwa kedua negara telah sepakat untuk mengembalikan hubungan mereka kembali normal *"at an early date"*. Adanya konfirmasi tersebut juga telah membuat penerapan sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD di Korea Selatan telah berangsur membaik, hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan bahwa pada awal bulan Oktober, Korea Selatan dan Tiongkok telah menyetujui untuk memperbarui swap mata uang sebesar US\$56 miliar dan maskapai penerbangan Tiongkok dilaporkan berencana membuka kembali rute penerbangan ke Korea Selatan (CNBC , 2017).

2.3.2. Chaebol

Selain pemerintah Korea Selatan, terdapat pihak lain yang juga terkena dampak dari adanya sanksi Tiongkok, pihak lain tersebut adalah Chaebol. Seperti yang dijelaskan pada sub sub-bab sebelumnya, Tiongkok telah memblokir akses barang dan jasa Korea Selatan di berbagai sektor termasuk pada sektor bisnis yakni dengan memboikot produk dan perusahaan yang berasal dari Korea Selatan di pasar Tiongkok.

Selama ini Tiongkok merupakan negara pasar terbesar bagi produk dan perusahaan Korea Selatan, sehingga terdapat banyak perusahaan dari Korea Selatan yang beroperasi di Tiongkok seperti halnya Chaebol. Beberapa perusahaan besar milik Chaebol yang beroperasi di Tiongkok antara lain seperti Lotte Group, Samsung Group, Kia Motor, LG Group, Hyundai Motor, SK Group, dan lainnya. (China Daily, 2014).

Dari banyaknya Chaebol yang beroperasi di Tiongkok dan terkena dampak dari adanya sanksi Tiongkok atas penempatan THAAD, Lotte Group merupakan salah satu pihak Chaebol yang terkena dampak signifikan. Hal ini berawal dari keputusan Lotte Group yang menyerahkan lahan golfnya di wilayah Seongju untuk ditukarkan dengan pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai lokasi penempatan THAAD. Keputusan Lotte Group ini dianggap sebagai pengkhianatan kepada Tiongkok, sehingga pemerintah Tiongkok memberikan sanksi pembalasan kepada perusahaan Lotte Group dengan cara menerapkan boikot pada produk-produk Lotte Group termasuk Lotte Mart dan Lotte Duty Free.

Dalam menerapkan sanksi pembalasannya kepada Lotte Group, pada bulan Maret pemerintah Tiongkok telah memerintahkan Lotte Group untuk menutup sementara gerainya, dengan keputusan ini setidaknya Lotte Group diprediksi akan kehilangan kurang lebih 300 miliar won (US\$263,97 juta). Pada bulan Mei, dari 99 total gerai milik Lotte Group yang berada di Tiongkok, 74 telah ditutup secara paksa oleh pihak berwajib dengan alasan inspeksi kebakaran dan keamanan, dan 13 gerai milik Lotte Group lainnya ditutup sementara karena adanya protes anti-Korea oleh warga. Selain itu, hampir 90% outlet milik Lotte Group tidak beroperasi kembali, sementara 12

sisanya tetap beroperasi namun harus berjuang dalam mendapatkan pelanggan (Hee, 2017).

Melihat kondisi perusahaannya yang semakin menurun akibat kesalahpahaman Tiongkok, membuat CEO Lotte Group yakni Shin Dong-bin melakukan pembelaan yang dimuat oleh CNN;

“I think there’s a lot of misunderstandings about our position, and we have nothing to do with the missile deployment. I would like to explain that Lotte would ultimately have had no choice because it was a matter of national security”- Shin Dong-bin (Mullen & Hancocks, 2017)

Pernyataan tersebut memuat pernyataan CEO Shin Dong-bin bahwa Lotte Group telah menerima banyak kesalahpahaman mengenai hubungannya dengan penempatan THAAD. Shin Dong-bin menjelaskan bahwa dalam kasus ini perusahaannya tidak dapat menolak permintaan penukaran lahan dengan pemerintah, terlebih lagi perintah ini merupakan upaya dalam menjaga keamanan nasional, sehingga apa yang dilakukan Lotte Group bukanlah sebuah kesalahan. Pihaknya telah mencoba untuk berkomunikasi secara langsung dengan pejabat pemerintah di Tiongkok sekaligus mencoba mengadakan beberapa pertemuan dengan duta besar Tiongkok di Korea Selatan untuk membahas situasi ini, namun upaya ini ternyata tidak membuahkan hasil. Meskipun begitu, pihak Lotte Group berharap bahwa permasalahan ini akan segera dapat diselesaikan (Mullen & Hancocks, 2017).

Hingga bulan April 2017, pihak Lotte Group tidak berencana untuk menarik kembali pasar mereka di Tiongkok karena berharap bahwa permasalahan ini akan segera dapat diselesaikan. Akan tetapi, kondisi yang tidak kunjung membaik selama

lebih dari 6 bulan membuat Lotte Group dan perusahaan lain semakin frustrasi karena semakin permasalahan ini berlarut-larut maka akan semakin sulit untuk kembali memenangkan pelanggan di Tiongkok. Oleh karena itu, pada bulan September terdengar kabar bahwa Lotte Group berencana akan menjual sahamnya yang berada di unit Tiongkok (Kim S. , 2017). Namun dengan adanya konfirmasi mengenai kembalinya hubungan kerjasama antara Korea Selatan dengan Tiongkok setelah bertemunya kedua pemimpin negara, tentunya Lotte dapat mengkaji kembali rencananya ini.